

**BANDIT-BANDIT REVOLUSI:
KEKERASAN TERHADAP RAKYAT SIPIL SELAMA PERANG
DI SUMATERA BARAT 1945-1949**

THE SOCIAL BANDITS DURING REVOLUTIONARY WAR PERIOD (1945-1949): THE VIOLENCE AGAINST CIVIL SOCIETY IN WEST SUMATRA

Maiza Elvira

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
maizaelvira@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 3 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan tahun 1945, di Sumatera Barat ketegangan mulai terasa seiring dengan munculnya kelompok pro dan kontra republik. Kelompok pro republik mulai melakukan operasi *sweeping* di beberapa wilayah basis Eropa di Sumatera Barat, seperti Padang, Sawahlunto, dan Bukittinggi. Operasi yang utamanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan Indo-Eropa, mulai melebar kepada masyarakat pribumi yang diduga termasuk kelompok anti Republik, seperti kaum bangsawan, etnis Tionghoa, pribumi pendatang seperti orang Nias dan orang-orang yang diduga dan dituduh sebagai “kaki-tangan” Belanda. Kelompok-kelompok tersebut menjadi sasaran operasi yang mereka lakukan: pembunuhan dan penyiksaan. Beberapa kali etnis Tionghoa, India dan pribumi yang menjadi sasaran kekerasan tersebut menyurati komandan pasukan Belanda saat itu yang berada di Padang untuk meminta bantuan. Aksi teror oleh kelompok liar bersenjata yang menamai dirinya kelompok *republikeun* tersebut melakukan penjarahan, dan sebelum mereka membakar rumah-rumah. Perempuan bahkan diculik; diperkosa dan kemudian dibunuh. Hal ini membuktikan bahwa di dalam tubuh tentara republik sendiri, bersemayam bandit-bandit yang motif perangnya bukan lagi semata-mata untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi dengan motif lain seperti balas dendam. Aksi bandit-bandit tersebut seolah dibiarkan, karena dilakukan atas dasar tujuan Revolusi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah siapa dan dari mana bandit-bandit ini datang, dan motif yang mendasari mereka melakukan aksi tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, dengan empat tahapan penelitian yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data yang digunakan berupa arsip, foto-foto, koran Belanda dan Indonesia, ego dokumen para pejuang di Sumatera Barat, dan wawancara dengan pelaku yang terlibat pada masa perang tersebut.

Kata kunci: Bandit, Revolusi, Sumatera Barat

Abstract

Not long after Indonesian independence was proclaimed in 1945, in West Sumatra tensions began to be felt along with the emergence of pro and contra republic groups. Pro-republic groups began sweeping operations in several European base regions in West Sumatra, such as Padang, Sawahlunto, and Bukittinggi. The operation, which was aimed primarily at Europeans and Indo-Europeans, began to spread to indigenous communities suspected of being anti-Republican groups, such as aristocrats, ethnic Chinese, migrant natives such as Nias people and those suspected and accused of being "accomplices" Netherlands. These groups were the target of their operations: murder and torture. Several times the ethnic Chinese, Indians and natives who were targeted by the violence sent letters to the commander of the Dutch troops at that time who were in Padang to ask for help. Acts of terror by armed groups calling themselves the republican group committed looting, and before they set fire to houses. Women were even kidnapped; raped and then killed. This proves

that within the republic's own army, the bandits whose motives for warfare are no longer solely intended to maintain independence, but with other motives such as revenge. The actions of the bandits seemed to be ignored, because they were carried out on the basis of the aims of the Revolution. The question is who and where these bandits came from, and the motives underlying them to carry out the action? This study uses a historical approach, with four stages of research namely, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data used in the form of archives, photographs, Dutch and Indonesian newspapers, ego documents of fighters in West Sumatra, and interviews with perpetrators involved during the war.

Keywords: *Bandits, Revolution, West Sumatra*

PENDAHULUAN

Euforia menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat, pada bulan Agustus 1945 itu tercederai dengan adanya kisruh perseteruan sesama etnis Nias, dan juga etnis Nias dengan orang pribumi Padang itu sendiri (Zed dkk, 2002: 82-83). Perkelahian dan kekacauan muncul di beberapa tempat. Penjarahan dan pencurian di tengah kekacauan tersebut tidak dapat dihindari. Di saat tokoh-tokoh Sumatera Barat tengah disibukkan oleh pembentukan pemerintahan kota, menghadapi Jepang yang masih merajalela, dan kekacauan masyarakat sipil. Ismail Lengah, seorang tokoh militer di Padang, beserta beberapa anggota militer lainnya melihat bahwa kekacauan di masa kekosongan kekuasaan ini dapat menimbulkan situasi yang berbahaya bagi keamanan masyarakat sipil.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, beserta beberapa tokoh lainnya, Ismail Lengah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang anggotanya diambil dari bekas anggota Gyugun (Korps Tentara Sukarela di Sumatera) dan Heiho (Korps Pasukan Cadangan). Tujuan dibentuknya BKR adalah untuk melakukan pengamanan terhadap situasi masyarakat, dan menyelesaikan kekacauan yang terjadi pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kekacauan yang terjadi antar masyarakat dapat diredam, situasi di Sumatera Barat mulai sedikit kondusif. Tokoh-tokoh lokal mulai menyusun struktur pemerintahan kota yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat di Jakarta, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) pada tanggal 31 Agustus 1945. Akan tetapi, situasi kembali memanas dengan adanya ketegangan antara tokoh-tokoh pro republik yang disebut

juga dengan *republikeun* dengan tokoh-tokoh yang dituding kontra republik. Ketegangan ini mulanya telah terasa sejak sehari sesudah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia.

Setelah Jepang menyerah kalah, orang Eropa yang sebelumnya ditempatkan di kamp-kamp interniran oleh tentara Jepang mulai dibebaskan. Akan tetapi situasi tidak kembali seperti semula. Tidak ada rumah tempat mereka bisa kembali pulang. Kediaman mereka sebelumnya saat itu telah memiliki pemilik baru, yaitu tokoh-tokoh dan pemuda republik yang mengambil alih aset-aset yang sebelumnya ditempati oleh bangsa Jepang. Mereka akhirnya berkumpul di Oranje Hotel di Jalan Gereja. Setiap hari gelombang pengungsi Eropa mulai kembali dari kamp interniran Jepang yang berada di luar wilayah Sumatera Barat, seperti Bangkinang. Tidak hanya hotel Oranje, kompleks gereja Katolik yang berada di sekitar hotel tersebut juga menjadi tempat penampungan mereka sementara. Tidak hanya orang Eropa saja, di antara mereka juga terlihat beberapa pemuda Tionghoa yang membawakan mereka pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (Memoir Ismail Lengah, tth: 37). Selain itu juga terdapat beberapa pasukan Belanda yang didatangkan dari Medan untuk mengawal bekas tawanan yang datang dari berbagai tempat tersebut. Selain orang Eropa dan Cina, juga terdapat beberapa orang Indonesia seperti diantaranya, bekas residen Sumatera Barat G.A. Boseelar dan Djalaluddin Thaib.

Kehadiran orang-orang Indonesia di Hotel Oranje tersebut menimbulkan ketidaksenangan di kalangan pejuang republik. Orang Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut dianggap sebagai pengkhianat. Pendekatan kemudian dilakukan oleh golongan tua *republikeun* yang berada di

Padang saat itu. Akan tetapi pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Beberapa tokoh yang dengan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada orang Eropa, masih menginginkan berdirinya kembali pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Hal ini menimbulkan kemarahan bagi kelompok pemuda republik. Orang-orang yang dinilai sebagai simpatisan Belanda kemudian di teror, rumah mereka didatangi, dianiaya, ditangkap, dan bahkan ada yang dibunuh. Terorisme dan vandalisme mulai menjalar, tidak hanya pada orang Eropa, pribumi, pribumi pendatang, tetapi juga menyasar masyarakat Tionghoa dan India menjadi korban tindakan kekerasan mereka. Penjarahan, penculikan, pemerkosaan, pembunuhan dan penganiayaan terjadi di banyak tempat.

Pemuda republik mempropagandakan tindakan mereka tersebut sebagai aksi revolusioner yang bertujuan untuk mendirikan kedaulatan Republik Indonesia. Aksi ini terus berlanjut bahkan setelah pasukan sekutu mendarat di Padang pada pertengahan Oktober 1945. Di antara kalangan *republikeun* itu sendiri juga terjadi pertentangan terhadap legalisasi aksi-aksi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda republik tersebut. Namun aksi tersebut tidak dapat mereka redam, walaupun aksi tersebut dinilai berlebihan dan tidak lagi menggambarkan aksi pejuang yang beradab.

Banyak aksi mereka yang dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai proklamasi, yang salah satu intinya adalah membebaskan anak bangsa dari berbagai penindasan. Aksi-aksi yang berlebihan ini, bisa dikatakan sebagai “balas dendam” atas berbagai pengalaman pahit yang mereka alami semasa pendudukan Jepang khususnya dan pengalaman pahit pada masa penjajahan (termasuk kolonialis Belanda) pada umumnya. Karena itu, aksi yang berlebihan ini umumnya ditujukan kepada apa saja yang berbau penjajahan, termasuk orang yang secara kebetulan memakai baju atau bahkan sapu tangan yang berwarna merah, putih, dan biru.

Bandit-Bandit Revolusi

Sebelum kedatangan sekutu ke Sumatera Barat, Belanda telah terlebih dahulu datang dan bermarkas di Hotel Oranje Padang. Mereka juga mengganti nama NICA (Netherlands Indies Civil Administration) menjadi C.C. AMACAB (Chief Commanding Officer, Allied Military Administration Civil Affairs Branch) yang lebih berbau sekutu. Pada saat sekutu mendarat, modal utama sekutu hanyalah berupa informasi dari NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service), sebuah badan intelijen Belanda pengganti PID (Politieke Intelligent Dienst). Akan tetapi, informasi yang diberikan NEFIS kepada sekutu ternyata tidak sepenuhnya benar, seperti informasi bahwa para pemuda tidak terlalu berminat dengan kemerdekaan, dan masih banyak di antara masyarakat Sumatera Barat yang sangat pro pengembalian kekuasaan Belanda di Sumatera Barat.

Namun, pada saat mendarat di Emmahaven, penurunan peralatan dan perlengkapan sekutu tersebut dibantu oleh banyak sekali kuli-kuli yang tidak seperti kuli, yang sibuk menghitung dan memetakan jumlah barang dan orang yang masuk ke Emmahaven. Bahkan perjalanan dari Emmahaven ke Padang, beberapa kali mereka bertemu dengan parade beribu-ribu pemuda yang menyorakkan pekik kemerdekaan (Verslag van de Gouverneur, 1946: 3-4).

Persinggungan pertama antara sekutu dengan orang Republik di Sumatera Barat adalah ketika sebuah pengumuman sekutu yang dikeluarkan oleh Jendral Hutchinson pada tanggal 10 Oktober 1945, dirobek-robek oleh masyarakat. Bendera merah putih yang diturunkan oleh sekutu di beberapa tempat juga menyulut amarah pemuda republik. Sekutu menyadari bahwa kedatangan mereka tidak diterima dengan baik oleh penduduk Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Spits yang melaporkan bahwa keadaan di Sumatera Barat khususnya di Padang tidak jauh berbeda dengan keadaan di Jakarta. Sikap penduduk sangat bermusuhan (Verslag van de Gouverneur, 1946: 387). Ketegangan dengan masyarakat, terutama

pemuda republik di Sumatera Barat terus terjadi. Sekutu banyak menerima laporan dari masyarakat yang berada di luar wilayah sekutu bahwa mereka sering diganggu oleh tentara republik.

Orang Tionghoa dan Nias adalah dua kelompok masyarakat yang paling sering meminta bantuan kepada sekutu. Dua kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang paling dicurigai oleh tentara republik sebagai kelompok yang dekat dan kerap memberikan informasi kepada Belanda. Orang Tionghoa seringkali dijarah tokonya, dan kemudian anggota keluarganya diculik untuk meminta tebusan. Selain itu perempuan dalam keluarga mereka juga diculik dan diperkosa oleh tentara republik (wawancara Kasurin).. Sedangkan orang Nias, ketika Belanda berkuasa di Sumatera Barat, banyak di antara mereka yang menjadi mata-mata Belanda dan juga menjadi pembunuh bayaran (wawancara Pak Jack). Sehingga pada saat perang revolusi, etnis ini menjadi salah satu sasaran teror tentara republik.

Pasukan sekutu tidak dapat berbuat apa-apa, selain meminta orang yang meminta bantuan tersebut untuk pindah ke wilayah sekutu agar tidak lagi diganggu oleh tentara republik. Hanya saja tidak semua yang mengikuti saran tentara sekutu tersebut. Puncak ketegangan tentara sekutu dengan tentara republik adalah ketika terjadi pembunuhan brutal terhadap seorang perawat palang merah Nona Allingham dan seorang serdadu Inggris, Mayor Anderson pada awal Desember 1945. Perawat dan mayor Inggris itu dibunuh oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai tentara republik ketika sedang mandi-mandi di Sungai Beremas, Padang.

Mereka bahkan memperkosa perawat tersebut secara beramai-ramai sebelum akhirnya dibunuh. Kejadian ini membuat tentara sekutu marah dan menyerang tiga perkampungan yaitu Gaung, Bukit Putus dan Bungus, satu barak tentara republik dan kantor BPPI Padang (Idroes, 62-63). Pada peristiwa tersebut diketahui bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang Bugis yang sebagian merupakan bekas tahanan yang dilepaskan pada masa perang oleh tentara

republik (wawancara Johnny Anwar, Kepala Polisi Padang). Orang Bugis tersebut merupakan anggota dari tentara non reguler atau tentara liar yang sama sekali tidak terikat dengan komando militer resmi.

Sedangkan tentara republik direkrut oleh komando militer yang resmi, di Sumatera Barat ramai bermunculan. Laskar-laskar dan gerakan pemuda yang biasanya bergerak secara independen itu telah ada di Sumatera Barat tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca penyerangan dua orang Inggris di Sungai Beremas tersebut, pihak republik melihat bahwa Inggris tidak ada bedanya dengan Belanda, dan harus disikat habis. Hal ini berakibat semakin bebasnya pemuda-pemuda laskar melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar jalur komando militer (Idroes, 63).

Laskar dan gerakan pemuda tersebut biasanya berasal dari partai politik tertentu. Tentara tersebut biasanya aktif di daerah pinggiran kota. Beberapa kali Komando tentara republik mencoba untuk merangkul mereka yang berada dalam teritorial komandonya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Mereka tetap saja bergerak independen, dan bahkan menyimpang dari instruksi komando militer yang seharusnya. Hal ini membuat situasi hubungan antara tentara republik dan tentara sekutu menjadi semakin memanas (Kahin, 2008: 159-161).

Pada awal kedatangan Belanda kembali ke Sumatera Barat, Kepala AMACAB telah menuliskan laporan bahwa sekitar 10.000 pemuda sukarela berkeliaran dengan persenjataan yang lengkap yang disinyalir didapat dari rampasan tentara Jepang. Para pemuda tersebut melakukan propaganda pro-republik. Selain itu banyak beredar pistol jenis revolver dan juga granat tangan di antara penduduk (Verslag van de Gouverneur, 1946: 386). Hal ini terus berkembang dan tidak dapat dicegah oleh tentara militer.

Krisis oleh gerakan pemuda dan laskar non militer dengan persenjataan lengkap tersebut terus berkembang dan dengan terang-terangan melancarkan aksinya. Misalnya yang terjadi di daerah Baso, yang dipimpin oleh revolusioner radikal Tuanku Nan Hitam. Aksinya tidak hanya menyasar orang Eropa

saja, tetapi juga orang-orang pribumi. Mereka mencegat dan merampok orang-orang yang melewati jalur Bukittinggi-Payakumbuh. Mencuri ternak penduduk di kampung-kampung sekitarnya, menculik dan membunuh pejabat lokal terutama yang memiliki kedudukan pada masa kolonial Belanda, dan masih memiliki kedudukan pada masa perang revolusi, untuk dimintai tebusan. Aksi ini berkembang pasca pidato oleh tokoh komunis Rustan Effendi yang menyerukan bahwa merampok dan mencuri untuk tujuan revolusi diperbolehkan dan merupakan jihad di jalan kebenaran (Kahin, 2008: 175-176).

Pada awalnya tentara (militer) republik dapat mentolerir perbuatan gerakan tersebut. Namun lama kelamaan mulai beredar kabar yang tidak baik mengenai kegiatan gerakan tersebut yang semula hanya menjarah dan merampok penduduk setempat, kemudian berkembang dengan menculik perempuan yang telah bersuami untuk mereka perkosa beramai-ramai di markas gerakan mereka.

Hal ini memaksa tindakan tegas dari komandan Divisi Dahlan Djambek untuk menumpas gerakan tersebut pada tanggal 16 April 1946. Setelah berhasil ditumpas, ternyata aksi bandit yang mengatasnamakan revolusi tersebut tidak berhenti begitu saja. Revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur, wilayah yang mana pemerintah republik kehilangan kontrol terhadap pemuda laskar yang melakukan huru-hara berupa pembunuhan bangsawan, pejabat-pejabat pemerintahan, penjarahan harta benda, ternyata juga berimbas pada perjuangan di Sumatera Barat (Kahin, 2008: 177-178).

Gerakan laskar dan gerakan pemuda kian merajalela, sehingga tentara militer republik mulai kewalahan menghadapi mereka hingga setahun kemudian, pada tanggal 3 Maret 1947, para bandit tersebut memutuskan untuk mengangkat senjata melawan pemerintahan republik di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Mereka berencana untuk melakukan kudeta dengan menculik residen Rasjid dan komandan militer Ismail Lengah. Aksi ini terjadi pasca perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh gerakan-gerakan tersebut. Selain itu, pembagian perlengkapan militer yang

hanya diperuntukkan bagi tentara reguler saja juga menyulut kemarahan mereka (Kahin, 1979: 172-176).

Di wilayah Pekanbaru, menurut laporan surat kabar *De Vrije Pers* dan *De Volksrant*, setelah orang Eropa dan sebagian orang Indo-Eropa dipindahkan dari Pekanbaru ke Padang untuk kemudian dievakuasi ke Batavia. Bangsa Tionghoa, India dan pribumi yang menjadi sasaran kekerasan menyurati komandan pasukan Belanda saat itu yang berada di Padang, Sumatera Barat, untuk meminta bantuan, karena telah terjadi aksi teror oleh kelompok liar bersenjata yang mengaku dirinya kelompok *republikeun* di wilayah kediaman mereka.

Kelompok tersebut menjarah semua barang yang mereka miliki secara paksa dan dengan kekerasan. Ada perempuan yang diculik untuk diperkosa dan kemudian dibunuh. Di wilayah Jambi juga tidak jauh berbeda. Setelah orang Eropa selesai dievakuasi ke Padang dan Palembang pada tahun 1946, terjadi teror mengerikan terhadap sisa orang Indo-Eropa, orang Tionghoa, India dan masyarakat pribumi.

Pemukiman masyarakat yang berada di satu wilayah dengan orang Eropa, dan merupakan distrik bisnis di Jambi kemudian dibakar oleh kelompok pejuang revolusi yang pada saat itu terdiri dari orang komunis dan tentara berseragam. Lebih dari 2/3 wilayah sentra bisnis tersebut ludes terbakar. Hunian orang Eropa, Tionghoa, India dan masyarakat lokal hancur total. Sekitar 7000 orang Tionghoa, 500 orang India, dan puluhan masyarakat lokal kehilangan tempat tinggal. Tak beberapa lama setelah itu, dengan dibantu oleh tentara republik dan sekutu, mereka mulai dievakuasi sebagian besar ke Padang dan Palembang (Koran *Het Nieuwsblad voor Sumatra* 11 Februari 1949).

Bandit-Bandit, Pasukan Militer, dan Kata Sepakat yang Tidak Pernah Tercapai

Melihat situasi perjuangan yang terbelah antara tentara gerakan pemuda serta laskar dengan tentara dari militer republik, membuat beberapa tokoh militer memutuskan

untuk membuat suatu pertemuan agar kata sepakat dapat dicapai. Aksi gerakan pemuda dan laskar sudah tidak dapat ditolerir lagi. Kegiatan pasukan mereka telah begitu jauh dari semangat proklamasi dan cita-cita kemerdekaan. Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 14-15 Januari 1949 di Situjuh Batur, Lima Puluh Kota. Pada pertemuan tersebut sekitar 80 pemimpin gerakan pemuda dan militer hadir di sana.

Beberapa pejabat tinggi Sumatera Barat yang hadir yaitu Chatib Sulaiman, Kolonel Dahlan Ibrahim—Panglima Komando Militer Sumatera Barat, Abdullah—pemimpin partai MURBA, dan beberapa pejabat militer dan sipil lainnya seperti Tahib, yang merupakan Komandan militer wilayah Payakumbuh. Akan tetapi, pada dinihari tanggal 15 Januari 1949 tersebut, beberapa saat setelah pertemuan tersebut selesai, serdadu Belanda menyerang lokasi pertemuan tersebut, dan berhasil membunuh 69 orang pada malam itu. Di antara yang terbunuh malam itu adalah Chatib Sulaiman.

Kecurigaan mengenai adanya mata-mata dan pengkhianat mulai mencuat di kalangan tentara laskar rakyat dan tentara militer republik. Kecurigaan jatuh pada Letnan I Kamaluddin dari Batalion Singa Harau. Kamaluddin yang populer juga dikenal dengan Tambiluak kemudian ditangkap oleh tentara laskar rakyat, disiksa, dipotong telinganya, sampai akhirnya ia berhasil melarikan diri. Namun naas, ia kembali tertangkap ketika akan melapor pada komandan divisinya, Dahlan Djambek di Kamang.

Segera setelah ia tertangkap, seluruh keluarganya kemudian dibunuh oleh tentara rakyat non militer (Azwar Dt. Mangiang, tth). Walaupun pada akhirnya tidak pernah terbukti keterlibatan Kamaluddin sebagai pengkhianat dalam peristiwa Situjuh Batur, namun peristiwa ini telah memperdalam jurang ketidaksepahaman antara tentara republik dan pasukan non militer di Sumatera Barat (Kahin, 2008: 218-219).

Penyerangan Situjuh Batur dan kematian Chatib Sulaiman ternyata tidak membuat hubungan antara pasukan militer dan pasukan laskar yang kerap melakukan huru-hara tersebut menjadi lebih baik. Tuduhan

pengkhianatan di tubuh pasukan militer republik membuat ketegangan semakin memanas. Selain itu perubahan komando militer di Sumatera Barat sebulan sebelum peristiwa Situjuh Batur oleh pemerintah pusat membuat tentara militer menjadi lebih rapuh. Pemberhentian Ismail Lengah pada awal Desember 1948, dan dipindahkannya komandan-komandan militer di Sumatera, termasuk di Sumatera Barat membuat Sumatera Barat berada pada posisi tanpa pemimpin yang ‘diakui’ oleh semua lapisan militer.

Banyak di antara pasukan militer yang berasal dari pasukan laskar dan gerakan pemuda yang dulunya direkrut oleh Ismail Lengah memilih kembali bersatu di bawah komando laskar mereka sebelumnya. Mereka kembali menjadi tentara liar dan tentara laskar yang berpencar-pencar di wilayah Pariaman, ke daerah pegunungan sebelah barat Bukittinggi, terutama ke daerah Danau Maninjau. Kekacauan mulai bermunculan seiring dengan semakin menyebarnya kelompok tentara liar dan laskar tersebut. Rombongan tentara liar tersebut kembali pada sifat gerakannya semula, agresif, tanpa koordinasi, tidak disiplin, yang melakukan berbagai perampokan, penjarahan, pencurian, dan pembunuhan di daerah pedalaman dan pemukiman masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Kahin, 2008: 221-222).

Walaupun kekacauan yang dilakukan oleh gerakan tentara liar dan laskar tersebut semakin meluas dan berkembang di banyak tempat, namun tentara militer republik tidak mempunyai kontrol terhadap aksi gerakan-gerakan tersebut. Walaupun para pemimpin partai telah mengeluarkan seruan kepada para laskar dan gerakan pemuda untuk mematuhi komando militer reguler, namun sepertinya tentara liar tersebut memiliki pemikiran yang berbeda dengan para pemimpin partai dan komando militer republik.

Akhirnya, pada tanggal 10 Mei 1949, Pemerintah Militer beserta pimpinan partai politik di Sumatera Barat mengeluarkan maklumat mengenai pelarangan keberadaan kekuatan militer selain dari prajurit pasukan reguler dan Barisan Pengamanan Negeri dan

Kota (BPNK) yang bertugas menjaga keamanan lokal. Setelah maklumat ini dikeluarkan, sebagian kecil dari tentara laskar mengikuti maklumat tersebut, dan sebagian besar lainnya tetap memerankan peran sebagai tentara liar yang kerap membuat keonaran dan kerusuhan di berbagai tempat. Adapun di antara mereka yang bergabung dalam pasukan reguler, ternyata hanya mendapat tempat di BPNK dan tidak dalam komando militer reguler sebagaimana yang dijanjikan semula.

PENUTUP

Setelah Belanda menyerahkan kekuasaan pemerintahan sipil di seluruh kota-kota di dataran tinggi Sumatera Barat pada awal Desember 1949, dan perang dengan Belanda benar-benar telah berakhir di Indonesia, aksi gerakan pemuda, tentara liar dan tentara laskar yang meresahkan masyarakat di Sumatera Barat tersebut juga mulai berangsur-angsur berkurang, hingga habis seluruhnya. Situasi Sumatera Barat yang pada saat itu digabungkan dalam satu propinsi, yaitu Sumatera Tengah menjadi lebih kondusif. Hanya pencurian kecil-kecilan saja yang masih tersisa dari perang revolusi tersebut. Namun situasi damai tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja. 7 tahun kemudian, tepatnya tahun 1957, Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat kembali bergolak. Kali ini musuh bersama mereka tidak lagi bangsa kulit putih, namun bangsa sendiri. Sumatera Barat melawan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Dt. Mangiang. Menyingkapkan Tabir yang Menyelimuti Peristiwa Situjuh Batur 15 Januari 1949. (naskah terketik tanpa tahun).
- Anton, Lucas. One Soul One Struggle Peristiwa Tiga Daerah Dalam Revolusi Indonesia. 2004. Yogyakarta: Resist Book
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa*

- Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980
- Biro Sejarah, *Medan Area Mengisi Proklamasi: Perjuangan Kemerdekaan Dalam Wilayah Sumatera Utara*. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.
- Fatimah Enar et al., *Sumatera Barat 1945-1950*. Padang: Pemda Sumbang, 1978.
- Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia* (Terj. Tim Penerjemah MSI Sumbang). Padang: MSI Sumbang dan Ex. CTP Sumbang, nt.
- 1979. Struggle for Independence: West Sumatra In The Indonesian National Revolution 1945-1950. Cornell University
- 2008. Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lukman Rahman, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Jambi*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983.
- Ma'mum Abdullah, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Mardjani Martamin et al, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/83.
- Mestika Zed, dkk. 2002. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 Di Kota Padang dan Sekitarnya. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*. Dajakarta: Kementerian Penerangan, 1954.

Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Tengah. Dajakarta: Kementerian Penerangan, 1954.

Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan. Dajakarta: Kementerian Penerangan, 1954.

S.M. Rasjid et al, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950* (2 Jilid) (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau [BPSIM], 1978, 1981).

S.P. Napitupilu, R.Z. Leiriza, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara.* Jakarta: Dep. P dan K, 1982.

Soewardi M.S. et al, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Riau.* Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

Verslag van de Gouverneur CCO-AMCAB, A.I. Spits, 18 January 1946, dalam OBNIB I 10 Agustus-november 1945.

Verslag van de Gouverneur CCO-AMCAB, A.I. Spits, 31 Dec. 1945, dalam OBNIB II 9 November-31 December 1945

Zakaria Ahmad et al, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Aceh.* Banda Aceh: Yayasan Peduli Nangroe Atjeh, 1982.

Surat Kabar

Algemeen Indisch Dagblad 15 Agustus 1947

De Vrije Pers 10 Januari 1049

De Volksrant 01 Februari 1949

De Locomotief 02 Juni 1948

Het Nieuwsblad voor Sumatra 11 Januari 1949

Haarlems Dagblad 28 Desember 1946

Haarlems Dagblad 24 Agustus 1949

Het Dagblad 09 Faebruari 1948

Java Bode 19 Januari 1952

Nieuwsblad van Het Noordon van Zaterdag 16 Augustus1975

Nieuwe Courant 03 Juni 1946

NRC Handelsblad 30 Juni 1984

NRC Handelsblad 25 Oktober 1986